Kebijakan Transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Utara: Perspektif Integrasi Sosial dan Transplantasi Kultural

Heru Susetyo¹
Satrio Alif Febriyanto²
Deden Ardiansyah³
Tien Tis'aini Latifah⁴
Feymi Angelina⁵
Ibrahim Ghifar Hamadi⁶
Najma Izzatul Haq⁷
M. Nurrobby Fatih⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}*Faculty of Law Universitas Indonesia*

Email Correspondence: hsusetyo@ui.ac.id

ABSTRACT

As one of the countries with the highest population in the world, Indonesia has an uneven population density in each region. This condition encouraged the creation of a transmigration policy to create an equal distribution of population density, which has been carried out since the Dutch East Indies colonial period. The transmigration policy transfers the population from areas with high population density to regions with low population density, equipped with land ownership, public facilities, and agricultural capital goods. The transmigration target area has a local population that has been settled for a long time, so there is interaction between the local population and transmigrants as immigrants. This interaction creates new forms of culture in accommodation and assimilation between the cultures of the local population and migrants. However, this interaction does not always positively impact the relationship between the local population and transmigrants because of the local community's resistance to transmigrants as migrants who are considered to pose a threat to the existence of the local population. The problem will be studied in this research using the socio-legal research method with North Bengkulu Regency as the object of research location to understand the pattern of interaction between residents and transmigrants and its impact on cultural formation through field observations to transmigration areas in North Bengkulu Regency and interviews with residents and transmigrants. This research employs Social Integration Theory of Emile Durkheim and the Cultural Transplant theory of Garrett Jones. Based on field data and analysis that has been conducted, the relationship between residents and transmigrants runs harmoniously without any conflict between residents while relatively maintaining their respective cultures. However, some habits of transmigrant communities are followed by residents, and there is disappointment among local communities due to the relocation of public facilities after the transmigration policy.

Keywords: *Accommodation; Local Community; Resistance; Transmigration Policy*

ABSTRAK

Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang tidak merata pada setiap daerahnya. Kondisi ini mendorong terciptanya kebijakan transmigrasi untuk menciptakan pemerataan kepadatan penduduk yang telah dilakukan sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Kebijakan transmigrasi dilakukan melalui pemindahan penduduk dari daerah dengan kepadatan penduduk tinggi ke daerah dengan kepadatan penduduk rendah yang dibekali kepemilikan tanah, fasilitas umum, dan barang modal yang bersifat pertanian. Daerah sasaran transmigrasi memiliki penduduk lokal yang telah menetap dalam jangka waktu lama, sehingga terdapat interaksi antara penduduk lokal dan transmigran sebagai penduduk pendatang. Interaksi tersebut menciptakan adanya bentuk-bentuk kebudayaan baru dalam akomodasi dan asimilasi antara budaya penduduk lokal dan transmigran. Meskipun demikian, interaksi tersebut tidak selalu berdampak positif dalam relasi antara penduduk lokal dengan transmigran karena adanya resistensi masyarakat lokal terhadap transmigran selaku pendatang yang dianggap memberikan ancaman terhadap eksistensi penduduk lokal. Permasalahan tersebut akan dikaji dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal dengan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai objek lokasi penelitian untuk memahami pola interaksi antara penduduk lokal dengan transmigran beserta dampaknya bagi pembentukan kebudayaan melalui observasi lapangan ke daerah transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Utara dan wawancara bersama penduduk lokal dan transmigran. Teori yang digunakan adalah teori integrasi sosial dari Emile Durkheim dan cultural transplant dari Garrett Jones. Berdasarkan data lapangan dan analisis yang telah dilakukan, relasi antara penduduk lokal dengan transmigran berjalan dengan harmonis tanpa ada konflik antar penduduk dengan relatif tetap mempertahankan budaya masing-masing. Meskipun demikian, terdapat beberapa kebiasaan masyarakat transmigran yang diikuti penduduk lokal dan terdapat kekecewaan di kalangan masyarakat lokal karena adanya pemindahan lokasi fasilitas umum pasca terjadinya kebijakan transmigrasi.

Kata Kunci : Akomodasi; Kebijakan Transmigrasi; Masyarakat Lokal; Resistensi

Pendahuluan

Sejarah transmigrasi atau pemindahan penduduk dari pulau ke pulau di Indonesia dimulai sejak pelaksanaan kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905.¹ Yang dimulai dengan pemindahan penduduk ke (kini) Desa Bagelen Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung.² Program transmigrasi awalnya disebut sebagai “kolonisasi” yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Sistem tanam paksa tersebut secara nyata telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat pribumi. Dari sisi ekonomi, hal ini mengakibatkan perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke arah pola ekonomi baru (dualisme ekonomi) dan semakin memperburuk kemiskinan, terutama di kalangan petani.³

Situasi tersebut mendorong para elit Belanda, seperti C. Th. van Deventer, untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Deventer merekomendasikan agar pemerintah Belanda memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah jajahannya, yang telah memberikan banyak keuntungan melalui sistem tanam paksa. Sebagai tanggapan atas tanggung jawab moral tersebut, pemerintah Belanda kemudian menerapkan politik etis di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui tiga program utama yang meliputi: (1) transmigrasi, (2) irigasi, dan (3) edukasi.⁴

Salah satu program politik etis yang membawa pengaruh besar adalah perihal transmigrasi. Kebijakan transmigrasi dari Pulau Jawa ke pulau lainnya didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) melaksanakan salah satu program politik etis, yaitu emigrasi, untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa dan meningkatkan taraf hidup yang rendah; (2) terbatasnya kepemilikan lahan di pulau Jawa akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat di sana; dan (3) kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa.⁵

¹ Nugraha Setiawan, *Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana UGM, 1994), hlm. 5.

² Aan Budiarto, *Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950an*, dalam *Jurnal Candi* Volume 20/ No.1/Tahun XI/ Maret 2020.

³ Hendra Kurniawan, *Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870* dalam *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 11 No. 2 tahun 2014.

⁴ Mayling Oey, “The Transmigration Program in Indonesia” makalah Seminar on Government Resettlement Programmes in Southeast Asia, (Canberra: Australian National University, 7 October 1980), hlm. 2-3.

⁵ Soedigdo Hardjosoedarmo (1965) dalam Mantra, I. B. *Pengantar Studi Demografi*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), hlm. 160.

Berdasarkan sejarahnya, kolonial Belanda telah melakukan program tersebut ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam program transmigrasi yang dilaksanakan di Indonesia, Provinsi Bengkulu menjadi salah satu wilayah di Pulau Sumatera yang menerima transmigran dari Pulau Jawa sejak masa Kolonial Belanda. Bengkulu menjadi salah satu daerah tujuan transmigrasi karena memiliki lahan pertanian yang potensial dan belum tergarap sepenuhnya.⁶ Seiring berjalannya waktu, program ini dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu contoh dari keberhasilan pembangunan wilayah Provinsi Bengkulu karena program transmigrasi adalah di Kawasan Transmigrasi Lagita (Kota Terpadu Mandiri Lagita atau singkatan dari Lais Giri Mulya dan Ketahun), Kabupaten Bengkulu Utara,⁷ yang dikukuhkan dengan Perda Kabupaten Bengkulu Utara No. 12 tahun 2016.⁸ Lebih dari setengah wilayah Bengkulu Utara tumbuh dari pemukiman transmigrasi.⁹ Hal tersebut menunjukkan dampak positif dari adanya program transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak program transmigrasi dari Pulau Jawa terhadap ketahanan nasional di daerah tujuan transmigrasi, melalui pendekatan integrasi sosial Emile Durkheim dan transplantasi kultural (cultural transplant) dari Garrett Jones.¹⁰ Dengan fokus penelitian di Kabupaten Bengkulu Utara, provinsi Bengkulu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal. Metode penelitian sosio legal adalah metode penelitian yang memfokuskan analisis permasalahan pada kontekstualisasi antara konsep yuridis normatif dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat.¹¹ Dengan proses analisis tersebut, metode penelitian sosio-legal menggunakan menggunakan disiplin

⁶Lindayanti, *Menuju Tanah Harapan Kolonisasi Orang Jawa di Bengkulu*, dalam Jurnal Humaniora Vol. 18 No. 3 Oktober 2006.

⁷ Iqbal Mujtahid, *et al*, "A Model of Policy Implementation of Integrated Self-Sufficient City on Transmigration Area (A Case Study in Northern Bengkulu, Bengkulu Province)," *Journal of Social Science Studies*, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 25.

⁸ Lihat : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/60161/perda-kab-bengkulu-utara-no-12-tahun-2016>

⁹ Institute for Ecosoc Rights and Norwegian Centre for Human Rights, *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit : Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit*, 2017.

¹⁰ Garrett Jones, *The Culture Transplant: How Migrants Make the Economies They Move To a Lot Like the Ones They Left*, Stanford University Press, 2022.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 2019), hlm. 258.

ilmu lainnya di luar hukum sebagai salah satu batu uji terhadap permasalahan yang diteliti.¹² Kondisi ini membuat analisis terhadap permasalahan dilakukan secara holistik dan komprehensif untuk mendapat kesimpulan yang menjadi solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pengambilan data yang menggunakan metode penelitian sosio legal dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan narasumber yang representatif. Observasi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi Kabupaten Bengkulu Utara secara spesifik ke lokasi transmigrasi yaitu Kecamatan Padang Jaya, dan Kecamatan Ketahun untuk mendapat gambaran konkret lingkungan tempat tinggal transmigran dan penduduk lokal dan pola interaksi antara keduanya. Penelitian juga dilakukan di Desa Srikaton, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk mendapatkan perbandingan eksistensi transmigrasi dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Di samping itu, pengambilan data juga dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, masyarakat lokal, dan masyarakat transmigran baik di Kota Bengkulu maupun di Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mendapatkan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap proses pelaksanaan kebijakan transmigrasi, dampak kebijakan transmigrasi, dan interaksi antara transmigran dengan penduduk lokal. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut nantinya akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan kerangka berpikir *cultural transplant* (transplantasi kultural) dari Garrett Jones.¹³ dan integrasi sosial dari Emile Durkheim.¹⁴ Dalam analisis kualitatif yang dilakukan, menjelaskan secara komprehensif dan holistik mengenai bentuk kebudayaan yang dihasilkan dan pola dari interaksi antara transmigran dan penduduk lokal di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pembahasan

1. Kebijakan Transmigrasi

Di era Orde Baru bahkan sampai sekarang ada tiga masalah pokok yang selalu muncul dalam setiap diskusi mengenai dinamika kependudukan Indonesia, yaitu : jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk relatif tinggi, dan distribusi penduduk tidak merata. Sejak

¹²Sulistyowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2011), hlm. 30.

¹³ Lihat : <https://merionwest.com/2024/04/08/people-over-place-a-review-of-the-culture-transplant-by-garett-jones/> diakses pada 4 September 2024.

¹⁴ Jonathan H. Turner, "Emile Durkheim's Theory of Social Organization," *Social Forces* 68, no. 4 (June 1990): 1089-1104.

dekade 1970-an, Pemerintah Orde Baru sudah berusaha untuk mengatasi persoalan struktural ini dengan program transmigrasi, dengan harapan dapat mempengaruhi distribusi penduduk di Indonesia. Paradigma yang awalnya dominan mempengaruhi program transmigrasi di Indonesia adalah bahwa transmigrasi merupakan sarana penyebaran penduduk dari Pulau Jawa, Madura dan Bali yang berpenduduk padat ke luar Pulau Jawa, Madura dan Bali yang berpenduduk jarang. Paradigma ini pula yang mendasari konsep transmigrasi seperti dikenal sekarang, yaitu perpindahan penduduk antar-pulau dengan menyeberangi laut, bukan antar-daratan. Program ini diprakarsai pemerintah karena pelaksanaannya memerlukan biaya sangat besar, khususnya pada tahap perambahan serta pembukaan lokasi baru di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali.¹⁵

Husodo (2003) menyatakan bahwa selain mendukung pengembangan perekonomian berbagai daerah dan perekonomian nasional, penyebaran penduduk melalui transmigrasi juga diperlukan untuk mengatasi masalah masalah yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk seperti di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk di pulau ini telah menimbulkan banyak masalah sosial dan ekonomi, serta menjadi penyebab kemiskinan penduduk, yang ditandai oleh bertambahnya jumlah buruh tani, petani gurem, nelayan miskin, dan para penganggur. Kondisi terlalu padatnya penduduk di Pulau Jawa ini sangat dirasakan dalam kehidupan sektor pertanian di pedesaan. Berbagai lahan usaha para petani yang semakin sempit menyebabkan budidaya pertanian menjadi kurang produktif dan tidak efisien. Karena penduduk di pulau ini sudah terlalu padat, maka kepemilikan lahan semakin sempit. Hal ini menggambarkan betapa tingginya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu disediakan lahan pertanian yang luas dengan tingkat kesuburan yang memadai, salah satunya melalui program transmigrasi. Berkaitan dengan maksud transmigrasi, dapat dikemukakan bahwa tujuan program transmigrasi yang juga menonjol adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di pulau-pulau besar Indonesia dan penyaluran potensi sumber daya manusia dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah di negara mengemukakan ini. Husodo menjelaskan bahwa (2003) sebenarnya program transmigrasi merupakan kegiatan investasi baik investasi manusia (human investment) maupun investasi modal (capital investment).¹⁶

¹⁵ Yanmesli, Anggun Dwi Utami, Supriyono, Muhammad Alfi. *Tantangan Masyarakat Transmigran dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara, Jurnal Georaflesia, Universitas Hazairin.*

¹⁶ *ibid.*

Program transmigrasi atau perpindahan penduduk telah dikenal sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, dengan istilah kolonisasi. Pelaksanaan program kolonisasi dimulai pada tahun 1905 (Heeren, 1979). Selanjutnya program setelah kolonisasi tetap diselenggarakan, yang dikenal dengan istilah transmigrasi. Menurut Swasono (1986), selama 80 tahun (hingga tahun 1986) pelaksanaan program kolonisasi dan transmigrasi, jumlah penduduk yang pergi ke luar Jawa hanya mencapai 3,65 juta jiwa, sementara penambahan penduduk pulau Jawa setiap tahunnya berjumlah dua juta jiwa. Kondisi ini menyebabkan tujuan pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sulit tercapai karena pelaksanaan program transmigrasi tidak disertai dengan pengendalian jumlah penduduk.¹⁷

Di masa kolonial, Belanda menjalankan program emigrasi sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis (*ethische politiek*). Program bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk di Pulau Jawa, sekaligus memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah. Pada masa resesi dunia melanda, khususnya pada 1927-1939, banyak pekerja migran atau kuli kontrak yang kembali ke Jawa karena hampir semua perkebunan di Sumatera mengalami kebangkrutan. Baru pada 1930, terjadi lagi perpindahan penduduk yang cukup besar dari Jawa ke Sumatera meski bantuan dari pemerintah Hindia Belanda seperti pinjaman kredit untuk membeli ternak, alat-alat pertanian, dan bahan-bahan membangun rumah, berkurang.¹⁸

Di masa pendudukan Jepang (1942-1945), program transmigrasi tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah Jepang. Jepang lebih fokus terhadap pengiriman penduduk sebagai buruh paksa atau *romusha* demi pengerjaan proyek-proyek pembangunan militernya. Ini berpengaruh terhadap sedikitnya penduduk Jawa yang pindah ke Sumatera. Jumlah penduduk yang dipindahkan ke luar Jawa kala itu mencapai 2.000 orang.¹⁹ Di masa pasca kemerdekaan, program transmigrasi kembali diinisiasi dengan dibentuknya panitia yang diketuai oleh AHD Tambunan pada 1948. Rencana ambisius disusun, yakni mengurangi jumlah penduduk Jawa dari 52 juta pada 1952 menjadi 31 juta pada 1987. Realisasinya, selama 1950-1959 hanya mampu memindahkan 227.360 jiwa. Target lalu diturunkan, yakni memindahkan 2 juta jiwa selama 1956-1960 atau 400 ribu jiwa per tahun.

¹⁷ Umi Yuminarti, *Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua: Masalah dan Harapan*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 12 No. 1 tahun 2017.

¹⁸lihat <https://cpps.ugm.ac.id/tantangan-transmigrasi-masih-banyak-yang-memilih-bermigrasi-ke-luar-negeri/>

¹⁹Lihat "Transmigrasi: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Bentuknya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6992734/transmigrasi-pengertian-sejarah-tujuan-dan-bentuknya>, diakses pada 6 September 2024.

Namun, target diturunkan lagi menjadi 1,56 juta jiwa untuk periode 1961-1968 atau 195 ribu per tahun.²⁰

Tujuan pokok program transmigrasi yang termuat dalam UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian adalah untuk kesejahteraan sekitarnya. Transmigran diharapkan dapat meningkatkan dan masyarakat meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, transmigrasi diharapkan tidak sekedar pemindahan penduduk, tetapi juga sebagai upaya untuk pengembangan wilayah, sehingga peran pemerintah daerah sangat penting, seperti yang tertuang dalam penjelasan UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997. UU tersebut menjelaskan bahwa dalam tata pemerintahan telah terjadi perubahan pendekatan yang semula sentralistik menjadi desentralistik dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi diarahkan sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya.²¹

Menurut Yudohusodo²², tiga kendala utama penyelenggaraan program transmigrasi, yaitu (1) kendala struktural, berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi, baik dengan program-program sektor lain maupun dengan instansi lain yang terkait; (2) kendala substansial yang berkaitan dengan kebutuhan agar pembangunan transmigrasi ikut memantapkan pembangunan nasional; dan (3) kendala teknis operasional yang disebabkan oleh kompleksnya masalah pembangunan transmigrasi. Kompleksitas masalah teknis operasional mengakibatkan munculnya masalah baru dalam program transmigrasi, antara lain pemilihan lokasi yang kurang tepat, studi kelayakan yang tidak tepat, penataan ruang dan pola usaha yang kurang sesuai, serta kurang terpadunya program lintas sektor dan lintas kegiatan pembangunan.²³

Program transmigrasi yang dikenal di Indonesia terdiri dari beberapa jenis transmigrasi. Namun, sebagian besar penduduk lebih tertarik mengikuti transmigrasi lokal dan transmigrasi umum, yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Hak sebagai peserta

²⁰ <https://cpps.ugm.ac.id/tantangan-transmigrasi-masih-banyak-yang-memilih-bermigrasi-ke-luar-negeri/>

²¹ *ibid.*

²² Yudhi Zuriyah Wirya Purba, Wardi Saleh, *Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian*, Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI), Volume 1 Nomor 1 Edisi Februari 2023

²³ Umi Yuminarti, *op.cit.*

transmigrasi tidak hanya lahan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga bantuan jaminan hidup sebesar 3,5 juta rupiah per bulan selama dua tahun dalam bentuk bahan pangan seperti beras, lauk-pauk dan berbagai barang konsumsi lainnya. Selain itu, pemerintah membangun berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, sarana medis, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya di lokasi yang baru. Hingga saat ini, perhatian pemerintah terhadap transmigran masih cukup besar dengan tetap tersedianya kebutuhan dasar. Namun demikian, hak peserta transmigrasi berkurang seperti luas lahan yang diterima masing-masing petani yang pada awalnya dua hektar kemudian menjadi satu hektar, sedangkan jatah hidup hanya diterima selama satu tahun mulai saat penempatan. Harapan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana di daerah transmigrasi adalah pembangunan nasional dapat tercapai melalui peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat di sekitarnya.²⁴

Pelaksanaan transmigrasi pada era otonomi daerah didukung oleh UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Ketransmigrasian. Sebelumnya, transmigrasi diatur dengan UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi. Perbedaan mendasar regulasi ketransmigrasian sebelum dan setelah era otonomi adalah pada pengertian transmigrasi. Pada regulasi sebelum era otonomi, transmigrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain untuk kepentingan pembangunan negara atau alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Sementara itu, setelah era otonomi, transmigrasi lebih ditekankan pada perpindahan penduduk secara sukarela²⁵ untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar dalam pelaksanaan transmigrasi pada era otonomi. Selain itu, pada regulasi baru transmigran perlu aktif terlibat dalam pembuatan program untuk rancangan pengembangan wilayah transmigrasi. Perubahan dalam regulasi ketransmigrasian dibuat untuk memperbaiki regulasi sebelumnya dan disesuaikan dengan perkembangan situasi setempat. Namun demikian, program transmigrasi dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan.²⁶

²⁴ibid.

²⁵ Lihat Indah Setyorini, Gusti Zulkifli Mulki, Firsta Rekayasa Hernovianty, *Peran Transmigrasi Terhadap Pengembangan Wilayah di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya*, dalam *JeLAST : Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang* Vol. 5, No 3 (2018)

²⁶ Umi Yuminarti, *op.cit.*

Menurut Dwiyanto²⁷, penyelenggaraan transmigrasi pada era otonomi daerah menimbulkan berbagai macam konflik, seperti konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah, konflik antarmasyarakat, dan konflik antardaerah. Latar belakang munculnya konflik antara lain (1) persoalan sosial, seperti perselisihan warga; (2) persoalan politik, seperti konflik antara kepala daerah dan DPRD, konflik antar-instansi, konflik antara pendukung partai politik; dan (3) persoalan ekonomi, seperti sengketa tanah, perselisihan pengelolaan sumber daya alam, konflik perburuhan.²⁸ I Made Sarmita²⁹ menyebutkan bahwa di balik potensi kehidupan yang lebih terjamin, ternyata dalam program ini juga menyimpan potensi konflik yang setiap saat bisa meletus. Potensi konflik di daerah transmigrasi akan terjadi jika tidak adanya kesesuaian budaya pendatang dengan budaya lokal, fanatisme kedaerahan, kecemburuan terhadap keberhasilan penduduk pendatang, perilaku penduduk pendatang yang menyinggung kebiasaan atau adat istiadat penduduk lokal dan semuanya itu akan terus terjadi apabila keberagaman yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan secara positif. Konflik juga terjadi disebabkan karena faktor lingkungan utamanya berkaitan dengan teori ketamakan serta teori kemerosotan dan kelangkaan sumberdaya alam.

2. Transmigrasi di Bengkulu Utara

Bengkulu merupakan propinsi yang istimewa karena 63 kecamatan dari 124 kecamatan di Bengkulu merupakan kecamatan transmigrasi. Hampir setengah penduduk Bengkulu adalah transmigran yang datang secara bertahap sejak kolonial Belanda pada 1907. Program transmigrasi berhasil mendorong terbentuknya empat kabupaten baru, yaitu Bengkulu Utara, Mukomuko, Kaur dan Seluma.³⁰ Di propinsi Bengkulu program transmigrasi yang berlangsung sejak jaman Belanda ini telah mendorong lahirnya desa-desa baru. Setidaknya ada empat UPT yang diserahkan kepada Pemda setempat telah berkembang menjadi Pusat Pemerintahan tingkat kecamatan, yaitu Muara Sahung (Kaur), Air Periukan (Seluma), Padang Jaya dan Giri Mulya (Bengkulu Utara). Beberapa kawasan

²⁷Dalam I Gde Nitiyasa & I Ketut Sudibia, *Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah*, PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. IX No. 1 Juli 2013.

²⁸ *ibid.*

²⁹ Lihat I Made Sarmita, *Potensi Konflik di Daerah Tujuan Transmigrasi (Kasus Sampit dan Mesuji)* dalam Jurnal Media Komunikasi Geografi, Vol. 15 No. 1 tahun 2014. Dapat diakses pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKG/article/view/11422>

³⁰ Institute for Ecosoc Rights and Norwegian Centre for Human Rights, *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit : Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit*, 2017.

transmigrasi juga berkembang membentuk kabupaten yaitu Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma dan Kaur.³¹

Di Bengkulu program kolonisasi pertama tercatat pada 1909 saat para kolonis pertama dikirim dari Bogor dan Priangan ke daerah Kepahiang. Dulu kawasan ini merupakan bagian wilayah Rejang Lebong . Pada 1904 Residen Bengkoelen berkembang pesat di bidang ekonomi pada 1904 setelah bergabungnya Rejang Lebong menjadi bagian residen Bengkoelen. Daerah Rejang Lebong yang subur menarik minat perusahaan-perusahaan bidang perkebunan untuk membuka lahan. Sejak 1890 hingga 1929 permintaan terhadap tanah persil perkebunan meningkat. Pada 1928 terdapat 10 perusahaan dengan jumlah kuli kontrak 4.534 orang laki-laki dan 3.292 orang kuli perempuan. Awalnya kolonisasi Bengkulu dilakukan dalam dua tahapan, masa percobaan kolonisasi pada 1907 dan masa kolonisasi setelah 1930. Program kolonisasi ini bukanlah murni pertanian seperti yang dilakukan pertama kalinya di Lampung, karena memiliki ketentuan sendiri yang dikenal sebagai Peraturan Bengkulu (Bengkoeloe stelsel). Ketentuan ini mengatur tentang pemberian tanah irigasi kepada para migran. Bedanya mereka juga harus mendapat penghasilan tambahan dari perusahaan swasta maupun milik pemerintah, sehingga tidak bergantung pada pertanian saja. Hal lain yang diatur adalah desa para transmigran merupakan bagian dari pemerintahan marga setempat. Jumlah migran ini terus bertambah di daerah Kapahiang Rejang dari 766 pada 1914 menjadi 4772 pada 1919. Sedangkan di Lebong para kolonis ditempatkan di sekitar pertambangan Redjang-Lebong, yang jaraknya hanya 1,25 pal dari lokasi tambang emas.³²

Lindayanti³³ memaparkan bahwa pada 1914 jumlah yang dipindahkan dari Jawa mencapai 282 kolonis dan kemudian meningkat menjadi 496 pada 1918. Selain bertani para kolonis juga bekerja sebagai kuli Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum atau pun perusahaan tambang di Tambang Sawah dan Lebong Simpang. Permasalahan kolonis di awal kepindahannya adalah gagal panen dan penyakit. Pada 1910 migran yang meninggal akibat demam dan disentri mencapai 66 orang, terdiri dari lima orang perempuan, 22 orang laki-laki dan 44 orang anak-anak. Jumlah penduduk terus berkurang karena angka kematian lebih tinggi dari pada kelahiran. Belum lagi banyak kolonis yang meninggalkan desa dan kembali ke Jawa. Pada 1920 ada 41 orang yang kembali ke Jawa. Baru setelah tujuh tahun

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Lindayanti, *Menuju Tanah Harapan Kolonisasi Orang Jawa di Bengkulu*, dalam Jurnal Humaniora Vol. 18 No. 3 Oktober 2006.

tinggal di wilayah transmigrasi, kehidupan para kolonis ini mengalami perbaikan. Saat sawah-sawah mereka sudah bisa ditanami padi dengan baik, sementara pekarangan ditanamai palawija, teh dan kopi. Kehidupan kolonis membaik setelah pembangunan saluran air irigasi untuk mengairi wilayah pertanian padi.

Pada masa Jepang banyak kolonis yang justru masuk ke pedalaman dan bekerja di daerah tambang emas seperti Rejang Lebong untuk menghindari wajib kerja dari tentara Jepang.³⁴ Tak sedikit kolonis yang dikirimkan ke Kawasan residen Palembang untuk bekerja membuat jalan kereta api. Setelah Indonesia merdeka mereka kembali ke lokasi kolonisasi mereka di Rejang dan Lebong. Kabupaten-kabupaten Transmigrasi. Setelah kemerdekaan program kolonisasi diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Pada 1948 dibentuk panitia untuk mempelajari program dan pelaksanaan transmigrasi. Transmigrasi pertama baru dilakukan dua tahun kemudian.

Pada masa Orde Lama Bengkulu masih menjadi bagian propinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Saat itu Sumsel menjadi tujuan utama transmigrasi pada 1957. Pada masa awal orde baru 1965–1969 sekitar 52 persen transmigran dipindah ke Lampung, Jambi dan Sumatera Selatan.³⁵ Barulah pada 1971 Bengkulu resmi menjadi provinsi baru. Sepanjang 1969–2009 sejak Pelita I (1969) hingga masa Reformasi di Bengkulu telah terdapat 150 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang menampung 120 ribu hingga 500 ribu keluarga pada delapan kabupaten yaitu kabupaten Bengkulu Selatan, kabupaten Rejang Lebong, kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten Kaur, kabupaten Seluma, kabupaten Lebong, kabupaten Mukomuko dan kabupaten Bengkulu Tengah. Beberapa UPT yang diserahkan telah berkembang menjadi pusat pemerintahan tingkat kecamatan, yaitu Muara Sahung (Kaur), Air Periukan (Seluma), Padang Jaya dan Giri Mulya (Bengkulu Utara). Beberapa kabupaten juga terbentuk berkat program transmigrasi yaitu kabupaten-kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma dan Kaur. Artinya separuh kabupaten di provinsi Bengkulu adalah warga transmigran dan keturunannya. Jika dilakukan *overlay* dengan peta batas administrasi, sekitar 60 dari 124 kecamatan di Bengkulu merupakan kecamatan transmigrasi. Kabupaten yang memiliki lokasi transmigrasi paling banyak adalah Bengkulu Utara dan Kaur, masing-masing 11 kecamatan, disusul Mukomuko dan Seluma masing-masing 10 kecamatan. Lokasi transmigrasi pada empat kecamatan tersebut totalnya berjumlah 134 lokasi.³⁶

³⁴ Institute for ECOSOC Rights, op.cit.

³⁵ Nugraha Setiawaan, op.cit.

³⁶ Institute for ECOSOC Rights, op.cit.

Pembangunan transmigrasi di Bengkulu Utara memang menjadi wujud keberhasilan dari kolaborasi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan program transmigrasi. Sebab, lebih dari 50 persen wilayah Bengkulu Utara tumbuh dari kawasan pemukiman transmigrasi. Dengan jumlah penduduk mencapai 296.523 jiwa, 35% diantaranya merupakan penduduk yang datang melalui transmigrasi. Masyarakat transmigran terakhir di Bengkulu Utara tercatat pada tahun 2016 dan bermukim di Kecamatan Enggano di Pulau Enggano.³⁷

Adapun salah satu wujud nyata hasil pembangunan kawasan transmigrasi yang mampu bertransformasi menjadi kawasan mandiri berdaya saing adalah Kawasan Transmigrasi Lagita (Kota Terpadu Mandiri Lagita).³⁸ Mayoritas transmigran di kawasan tersebut memiliki usaha sebagai petani sawit melalui lahan-lahan usaha yang ada di kawasan transmigrasi. Selain itu, pengembangan fasilitas di Kawasan Transmigrasi Lagita dapat dibidang cukup lengkap, salah satunya dari sarana pendidikan sudah tersedia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan perguruan tinggi serta terdapat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lagita untuk sarana kesehatan.

Kawasan Lagita merupakan kawasan transmigrasi dengan predikat Kota Terpadu Mandiri (KTM) pertama di Provinsi Bengkulu. Lahirnya kebijakan pembangunan dan pembentukan Kawasan Lagita berangkat dari kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 214/ MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi.³⁹ Secara lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengusulkan adanya pembangunan dan pembentukan Kawasan Terpadu Mandiri Lagita dengan turut diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pembangunan Dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lagita Pada Wilayah Pengembangan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara (PERDA 12/2016). Dengan begitu, Kawasan Lagita secara bertahap dibangun dan dibentuk hingga mampu merealisasikan harapan akan kemandirian kawasan transmigrasi.

Keberhasilan transformasi kawasan transmigrasi menjadi kawasan mandiri berdaya saing telah membuktikan bahwa kawasan transmigrasi tidak selamanya bergantung pada

³⁷ Kabupaten Bengkulu Utara, "Bengkulu Utara Gelar Upacara Hari Transmigrasi ke 66 Bela Negara dan Hari Ibu ke 88," <https://bengkuluutarakab.go.id/bengkulu-utara-gelar-upacara-hari-transmigrasi-ke-66-hari-bela-negara-dan-hari-ibu-ke-88/>, diakses pada 2 September 2024.

³⁸ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-6328940/program-transmigrasi-lagita-dorong-kesejahteraan-warga-di-bengkulu-utara>, diakses pada 6 September 2024.

³⁹ Lihat Dodi Harsono & Ahmad Aminudin, *Koordinasi dalam Model Pengembangan Wilayah Berbasis Kota Terpadu Mandiri (KTM), Studi Pada KTM Lagita (Lais, Giri Mulya, Ketahun), Kabupaten Bengkulu*, Jurnal Governance dan Administrasi Publik VOL. 5 NO. 2 (SEPT,2021).

bantuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kawasan Lagita sendiri merupakan singkatan dari beberapa kecamatan yakni Lais, Girimulya, dan Ketahun. Akan tetapi, mengacu pada PERDA 12/2016, Kawasan Lagita terdiri atas beberapa kecamatan lainnya yakni Kecamatan Batiknau; Kecamatan Napal Putih; Kecamatan Pinang Raya; Kecamatan Air Padang; Kecamatan Padang Jaya; dan Kecamatan Ulok Kupai.

Sebagai KTM, Kawasan Lagita diharapkan mampu menciptakan sentra agribisnis, sentra agroindustri dan sentra agrowisata berbasis komoditas unggulan yang mampu menarik investasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan begitu, diharapkan pula Kawasan Lagita dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru serta mampu membuka kesempatan kerja dan peluang usaha di Kabupaten Bengkulu Utara. Sejalan dengan harapan tersebut, berdasarkan hasil evaluasi, Kawasan Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara indeksinya telah mencapai 75 dan termasuk kategori Berdaya Saing.

Selain desa-desa di Kawasan Lagita, kawasan transmigrasi di Bengkulu Utara lainnya yang dapat dikategorikan sebagai desa transmigrasi mandiri adalah Unit Pelaksana Transmigrasi (UPT) Kuro Tidur. Dalam hal ini, UPT Kuro Tidur terdiri atas beberapa kecamatan yang secara aktif dan berdaya menjadi daerah agrobisnis sekaligus pariwisata, yakni Padang Jaya dan Giri Mulya. Walaupun kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah transmigrasi, keduanya memiliki karakteristik berbeda. Padang Jaya dihuni oleh masyarakatnya yang heterogen. Asal warga transmigrannya beranekaragam karena datang dari daerah yang berbeda-beda. Sedangkan Giri Mulya bersifat homogen karena mayoritasnya merupakan hasil bedol desa dari Wonogiri.⁴⁰

Salah satu desa transmigrasi di Kecamatan Padang Jaya dalam UPT Kuro Tidur adalah Desa Marga Sakti. Dalam hal ini, Desa Marga Sakti merupakan daerah hasil transmigrasi yang saat ini sudah berstatus desa mandiri. Hal tersebut yang bertolak ukur adanya fasilitas umum, aktifnya pasar, tersedianya akses jalan, serta kondisi ekonomi yang meningkat. Desa Marga Sakti yang memiliki luas 1.700 hektar terdiri dari 50 UPT, 7 dusun, dan 2.200 kepala keluarga. Di tengah posisinya sebagai penghuni desa transmigrasi, masyarakat Desa Marga Sakti masih sangat lekat dengan nilai-nilai Jawa dalam kesehariannya. Salah satu nilai melekat dan mereka bawa menyebrang pulau adalah “Kalau kurang, *wirang* (malu)”. Nilai tersebut yang menjadikan mereka bersungguh-sungguh dan ulet dalam pekerjaan sehari-

⁴⁰ Hasil wawancara mendalam dengan Sujono, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu 2019-2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 di Kota Bengkulu.

hari.⁴¹ Saat pertama kali datang, masyarakat transmigran di Desa Marga Sakti mendapat 2 (dua) hektar lahan dan melakukan *babat alas* untuk membuat persawahan. Dalam hal ini, mereka tidak serta-merta memiliki kemampuan bertani atau berkebun karena sempitnya lahan di Pulau Jawa. Akan tetapi, saat bertransmigrasi ke Pulau Sumatera mereka diberi lahan luas sehingga mau tidak mau harus menggarap lahan tersebut untuk dijadikan pertanian atau perkebunan. Adanya kondisi memaksa, kemauan, dan kegigihan mereka untuk beradaptasi itulah yang membuat kebanyakan masyarakat transmigran dapat bertahan.

Hampir sama dengan Desa Marga Sakti, desa transmigrasi di UPT Kuro Tidur yang sudah berstatus desa mandiri juga disematkan pada Desa Padang Jaya. Dalam hal ini, Desa Padang Jaya dikenal sebagai kawasan agromina (pertanian ikan air tawar) dan memiliki daerah irigasi besar yang dibangun saat zaman orde baru. Desa Padang Jaya terdiri dari 9 dusun, 49 Rukun Tetangga (RT), dan 1.860 Kartu Keluarga (KK). Sama seperti Desa Marga Sakti, masyarakat Padang Jaya juga bermata pencaharian dengan berkebun. Sebelum berpredikat sebagai desa mandiri, Desa Padang Jaya sempat mengalami pergulatan ekonomi untuk dapat bertahan hidup dalam program transmigrasi. Ketika jaminan hidup (jadup) yang diberikan oleh pemerintah pusat telah berhenti, tanah yang sudah digarap oleh masyarakat sempat belum berhasil, sehingga masyarakat menjadi kesulitan secara ekonomi. Setelah itu, masyarakat mulai mengalami pergeseran profesi dari petani palawija menjadi perkebunan dan perikanan, yang kemudian membuat perekonomian meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa transmigrasi di Bengkulu Utara, khususnya di Desa Padang Jaya, sempat mengalami adaptasi dan pergeseran profesi untuk kemudian dapat berkembang menjadi desa transmigrasi yang mandiri.⁴²

Kebijakan transmigrasi di Bengkulu Utara secara nyata juga berpengaruh pada merebaknya budaya dan tradisi Jawa di daerah Bengkulu. Paling tidak hal tersebut tercermin dari berkembangnya pertunjukan wayang kulit dan sedekah bumi yang hingga saat ini masih dilakukan masyarakat Desa Srikaton, satu desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, persis di selatan Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagai bentuk syukur atas terlindunginya desa Srikaton dari bencana. Desa Srikaton juga merupakan salah satu desa transmigran yang masyarakatnya didominasi oleh Suku Jawa. Kendati demikian, warga desa Srikaton pun

⁴¹ Hasil wawancara mendalam dengan Karyadi, Kepala Desa Padang Jaya dan Soemaryono Kepala Desa Marga Sakti, pada tanggal 17 Agustus 2024 di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

⁴² Hasil wawancara mendalam dengan Karyadi, Kepala Desa Padang Jaya dan Soemaryono Kepala Desa Marga Sakti, pada tanggal 17 Agustus 2024 di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

sudah bercampur dengan masyarakat lokal yang masuk ke Desa Srikaton.⁴³ Dalam melestarikan budaya Jawa, Desa Srikaton memiliki sesepuh atau ketua adat yang juga berperan sebagai penyelesaian sengketa jika terdapat pelanggaran adat. Dengan budaya gotong royong yang masih terjaga, para warga masih taat kepada ketua adat. Meski merupakan desa transmigrasi, saat ini Desa Srikaton telah menjadi desa yang maju. Hal tersebut ditunjukkan dengan fasilitas desa yang lengkap, kegiatan ekonomi perkebunan sawit yang hidup, tersedia instansi pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan instansi pemerintahan yang lengkap.⁴⁴

Ahmad Wali menyebutkan bahwa sebenarnya Program Transmigrasi itu sistem Proyek dari era Departemen Transmigrasi. Setiap Unit Permukiman Transmigrasi dipimpin seorang PNS Kepala UPT selama 5 Tahun. Setelah itu diharapkan menjadi Desa Persiapan, kemudian menjadi Desa Mandiri. Saat ini semua bekas Unit Pemukiman Transmigrasi telah menjadi Pemerintah Desa setara dengan Desa Pribumi. Bahkan Desa Bekas UPT Transmigrasi cenderung lebih maju.⁴⁵

Kebijakan transmigrasi di Bengkulu Utara dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Perkembangan masyarakat Bengkulu Utara tidak hanya tercermin dari aspek ekonomi, tetapi juga budaya setempat. Dalam hal ini, kebijakan transmigrasi di Bengkulu Utara mempengaruhi perekonomian daerah dengan masifnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa transmigrasi. Selain itu, budaya serta tradisi Jawa juga turut berkembang yang menandakan semakin meleburnya garis batas geografis antar wilayah sehingga jurang pemisah antar budaya juga semakin kabur.

Pada tahun dekade 2020-an ini sudah tidak ada lagi pengiriman transmigrasi dari Pulau Jawa. Karena prioritas pemerintah pusat sekarang adalah ke Kalimantan Timur (sekitar IKN). Namun demikian masih ada desa transmigrasi yang masih dibina oleh Dinas Transmigrasi Propinsi Bengkulu karena usia kedatangan transmigran-nya relative lebih muda daripada para transmigran terdahulu ke daerah Rejang Lebong dan Bengkulu Utara, yaitu di Bengkulu Selatan dan juga di Pulau Enggano.⁴⁶

⁴³ Hasil wawancara mendalam dengan M. Sarjoni, Kepala Desa Srikaton pada tanggal 19 Agustus 2024 di Desa Srikaton, Kabupaten Bengkulu Utara.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Keterangan dari Ahmad Wali, Staf Pengajar FH Universitas Bengkulu, pada 16 Agustus 2024 di Bengkulu.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu di Kota Bengkulu pada 16 Agustus 2024.

3. Implikasi Transmigrasi terhadap Kesejahteraan dan Kebudayaan Masyarakat Bengkulu

Program transmigrasi di Bengkulu telah memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah transfer pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian dan perikanan dari para transmigran kepada penduduk setempat.⁴⁷ Kehadiran masyarakat transmigran juga meningkatkan pendapatan daerah Bengkulu karena banyak masyarakat transmigran yang bekerja di multi sektor, seperti perdagangan, perkebunan, dan pertanian. Tidak hanya itu, populasi penduduk di Provinsi Bengkulu juga meningkat menjadi sekitar dua juta jiwa mengingat Provinsi Bengkulu kala itu masih kekurangan penduduk. Keberhasilan program transmigrasi terlihat jelas di wilayah Selatan, seperti di Trans Sulau (Air Sulau-Bengkulu Selatan, di mana daerah transmigrasi telah berkembang menjadi kawasan yang kaya dan makmur. Dampaknya sangat luas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan banyak warga yang bekerja sebagai pekebun dan memasarkan hasil tani mereka di pasar-pasar lokal⁴⁸.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ahmad Wali. Ia menyebutkan bahwa dari segi pertumbuhan penduduk mengisi wilayah kosong untuk lepeningan sistem pertahanan rakyat semesta sangatlah bena. Proyek Transmigrasi untuk membuka wilayah baru menjadi pasar dan pusat pertumbuhan ekonomi adalah benar. Namun tetaplah para pedagang yang untung. Kehidupan petani bekas peserta program transmigrasi sangat menderita dulu pada era tahun 1985-1998. Situasi berubah ketika petani berubah menanam kelapa sawit. Setelah tanaman kelapa sawit menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS) dijual ke Pabrik Minyak CPO barulah kesejahteraan masyarakat bekas peserta transmigrasi meningkat kaya. Era Tahun 2000 ke atas Jadi keberhasilan proyek transmigrasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat asal Pulau Jawa terjadi era tahun 2000 ke sekarang sekitar 25 tahun terakhir.⁴⁹

Peserta proyek transmigrasi asli Jawa Tengah banyak gagal. Tahun 1985-1990 lahan kering tidak bisa menanam padi. Mereka yang tidak tahan maka menjual lahan transmigrasi dan pulang kembali ke Pulau Jawa. Sebagian lagi bertahan di Bengkulu. Kalau peserta transmigrasi Bedol Desa korban Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo dan Waduk

⁴⁷ Renol Hasan, et al, "Persepsi Masyarakat Transmigran Jawa di Daerah Paguyaman Provinsi Gorontalo Terhadap Kebijakan Transmigrasi Pada Masa Pemerintahan Soeharto," *Dynamics of Rural Society Journal*, vol. 1, no. 1 (Januari 2023), hlm. 32-41.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Bengkulu di Kota Bengkulu, 19 Agustus 2024.

⁴⁹ Keterangan dari Ahmad Wali, Staf Pengajar FH Universitas Bengkulu, pada 16 Agustus 2024 di Bengkulu.

Gajah Mungkur tetap bertahan di Bengkulu. Saat ini situasinya banyak Petani Asal Jawa bekas Keturunan Transmigrasi Kolonial Belanda dari Provinsi Lampung yg merantau ke Bengkulu dan kemudian membeli tanah bekas lahan transmigrasi.⁵⁰

Sementara itu, Siswanto mengungkapkan bahwa dapat dikatakan bahwa warga transmigran menjadi penentu arah kebijakan pemerintahan Provinsi Bengkulu. Warga trans sedikit lebih maju pengetahuannya dibanding penduduk lokal, selain itu warga transmigran cenderung lebih ulet dibanding penduduk lokal. Sebagai contoh, ada seorang warga transmigran yang bisa menyekolahkan anaknya dengan bekerja mengolah kotoran sapi. Hal seperti itu ketika itu belum terpikirkan oleh warga lokal. Mencari nafkah melalui kotaran sapi. Bisa dikatakan Orang Jawa itu telaten dan konsisten, Contoh: saat jadi kuli bangunan, orang Jawa sudah bisa memetakan berapa jumlah SDM/kuli yang dibutuhkan per-harinya untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Mereka awalnya datang bertani, tapi skill mereka lebih tinggi. Intinya skill lebih tinggi karena kreativitas dalam banyak hal, termasuk bertahan hidup. Orang Jawa di Bengkulu terlihat lebih kreatif.⁵¹

Transmigran yang berasal dari Jawa dikenal memiliki keunggulan dalam transfer pengetahuan, yang membawa masyarakat lokal selangkah lebih maju. Lebih lanjut, bagi transmigran Jawa, program transmigrasi sangat menguntungkan karena masyarakat transmigrasi diberikan lahan seluas dua hektar dengan sertifikat hak milik. Selain itu, program ini juga berhasil membangun permukiman baru beserta infrastruktur pendukung, seperti jalan di tengah hutan yang turut membuka akses dan mendorong pembangunan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, transmigrasi berkontribusi pada pertumbuhan permukiman baru dan pengembangan lahan produksi. Salah satu contoh transmigran Jawa yang membawa pengaruh positif terhadap daerah barunya adalah di Desa Marga Sakti. Di desa tersebut, masyarakat transmigrasi Jawa mengalami perubahan dari aktivitas bertani menjadi berkebun membawa peningkatan kesejahteraan, terutama karena sektor perkebunan yang lebih prospektif.⁵²

Akan tetapi, kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat transmigran di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya baru mulai dirasakan secara nyata pada generasi kedua. Masyarakat transmigran awalnya tidak memiliki keterampilan dalam bertani atau berkebun

⁵⁰ Keterangan dari Ahmad Wali, Staf Pengajar FH Universitas Bengkulu, pada 16 Agustus 2024 di Bengkulu.

⁵¹ Sesuai penuturan Bapak Siswanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Bengkulu di Kota Bengkulu, 19 Agustus 2024

⁵² Hasil wawancara mendalam dengan Soemaryono, Kepala Desa Marga Sakti pada tanggal 17 Agustus 2024 di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

karena lahan di Pulau Jawa yang sempit membuat mereka terbatas dalam praktik pertanian. Namun, ketika mereka bertransmigrasi ke Pulau Sumatera dan diberikan lahan yang luas, mereka, yang berasal dari berbagai latar belakang, harus beradaptasi dan mengelola lahan tersebut menjadi perkebunan. Kondisi yang memaksa ini, dikombinasikan dengan tekad untuk beradaptasi, menjadikan para transmigran mampu bertahan dan akhirnya mencapai kesuksesan. Lebih lanjut, masyarakat transmigran di Desa Marga Sakti juga mengamalkan nilai-nilai Jawa dalam kehidupan sehari-hari, seperti prinsip *wirang* (malu) jika gagal sehingga yang membuat mereka bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Di Desa Marga Sakti, budaya keamanan, ketertiban, dan gotong royong yang kuat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan dan interaksi sosial. Harmoni di desa ini terjaga dengan baik, tanpa adanya ketimpangan kekuatan antar kelompok.

Di sisi lain, program transmigrasi di Provinsi Bengkulu telah menimbulkan sejumlah implikasi negatif yang kompleks. Dalam diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) yang dilakukan oleh Tim Penulis bersama Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, terungkap bahwa dari sisi hukum, transmigran yang umumnya berasal dari Jawa diberi lahan dengan sertifikat hak milik.⁵³ Namun, mereka sering menghadapi kendala infrastruktur yang menghambat pemanfaatan lahan tersebut. Hal ini timbul akibat rumitnya permasalahan dalam pembangunan transmigrasi. Kerumitan ini menimbulkan sejumlah masalah baru, termasuk pemilihan lokasi yang tidak optimal, studi kelayakan yang kurang akurat, penataan ruang dan pola usaha yang tidak cocok, serta kurangnya koordinasi antara program lintas sektor dan lintas kegiatan pembangunan. Banyak transmigran yang tidak bertahan dan memilih untuk menjual lahannya kepada sesama transmigran, yang kemudian memicu konflik kepemilikan karena transaksi jual beli tersebut sering kali tidak jelas secara hukum. Meskipun demikian, konflik agraria jarang terjadi karena wilayah transmigrasi umumnya adalah lahan kosong yang tidak berbenturan dengan lahan milik warga lokal.

Konflik yang muncul umumnya terkait kecemburuan sosial, di mana masyarakat transmigran umumnya menerima lebih banyak bantuan dibandingkan warga setempat. Secara sosial, program transmigrasi menciptakan ketimpangan antara desa-desa transmigran dan penduduk asli, baik dalam hal infrastruktur maupun kesejahteraan ekonomi. Ketidakadilan ini muncul karena pemerintah cenderung memberikan prioritas lebih kepada

⁵³ Hasil FGD dengan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2024 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

para transmigran daripada penduduk setempat. Selain itu, terjadi disparitas sosial dan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang, dengan penduduk transmigrasi sering kali lebih maju dalam berbagai aspek sehingga menimbulkan disintegrasi sosial, terutama karena desa-desa transmigrasi sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan permukiman asli, khususnya terkait kepemilikan lahan dan sertifikat tanah. Desa-desa transmigrasi menikmati infrastruktur yang lebih baik, sedangkan penduduk lokal seringkali terabaikan, terutama dalam persoalan kepemilikan lahan yang kompleks.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Dwiyanto (2003) terkait dengan konflik penyelenggaraan transmigrasi pada era otonomi daerah, khususnya terkait (1) persoalan sosial, seperti perselisihan warga dan (2) persoalan ekonomi, seperti sengketa tanah, perselisihan pengelolaan sumber daya alam, konflik perburuhan.⁵⁴

Penelitian dari Institute of Ecosoc Rights tahun 2017⁵⁵ menyebutkan bahwa di Provinsi Bengkulu ada tiga wilayah yang terkait konflik antara warga dan perusahaan, yaitu kabupaten Seluma, kabupaten Mukomuko dan kabupaten Bengkulu Utara. Ketiga kabupaten tersebut merupakan sebaran dari program pemerintah terkait transmigrasi. Bengkulu penting untuk dibicarakan karena Bengkulu yang kecil ini dikelilingi oleh taman nasional. Bengkulu punya peran penting terkait penyelamatan Taman Nasional Bukit Barisan dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Bengkulu punya problem besar terkait alih fungsi lahan pangan. Masuknya perusahaan sawit di kawasan-kawasan tersebut membuat para petani kehilangan lahan pangan dan kini mereka menjadi tergantung pada daerah lain untuk mendapatkan pangan. Selain itu, ada problem infrastruktur yang sangat menyolok di provinsi ini. Hanya ada dua jalan yang bisa dilalui, yaitu jalur sungai dan jalur perkebunan sawit.

4. Implikasi Transmigrasi terhadap Integrasi Sosial dan Ketahanan Nasional Masyarakat Bengkulu

Terkait dengan aspek ketahanan nasional, dahulu kepentingan Presiden Soeharto (di masa Orde Baru) untuk melakukan program transmigrasi dilakukan karena Provinsi Bengkulu merupakan daerah kosong sehingga harus diisi oleh penduduk. Secara historis, Provinsi Bengkulu memiliki peran penting dalam dinamika politik pertahanan dan keamanan Indonesia pada masa lalu. Bengkulu menjadi salah satu basis strategis karena

⁵⁴ Dwiyanto, *op. cit.*

⁵⁵ Institute for Ecosoc Rights and Norwegian Centre for Human Rights, *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit : Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit*, 2017.

letak geografisnya yang dekat dengan Sumatera Barat, menjadikannya jalur penting bagi aliran senjata dan dukungan logistik yang diberikan kepada PRRI. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya Bengkulu dalam konteks geopolitik dan konflik ideologis yang melibatkan kekuatan asing pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Ahmad Wali mengkonfirmasi pendapat ini dengan mengungkapkan bahwa dari segi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Proyek Transmigrasi dibutuhkan dan bermanfaat mengisi Kekosongan Wilayah untuk mencegah infiltrasi intelijen asing dan pasukan asing untuk melakukan Insurjensi seperti di Papua dan Aceh. Karena dulu Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat banyak Tanah Hutan di sepanjang Pantai Barat Sumatera adalah kosong dan pernah menjadi infiltrasi CIA yang mengirimkan Senjata Bazooka dan AR 15 untuk para pemimpin pemberontak PRRI. Basis Pemberontak PRRI adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara. Pengiriman Senjata oleh CIA melalui kapal laut di sepanjang Pantai Barat Sumatera terutama perbatasan Bengkulu dan Sumatera Barat.⁵⁶

Program transmigrasi di Bengkulu memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan nasional, terutama dari segi demografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari sisi demografi, program ini berhasil meningkatkan populasi di Bengkulu, memperkuat basis penduduk yang lebih beragam, dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Pertumbuhan populasi ini juga berkontribusi terhadap penyebaran penduduk yang lebih merata, mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, serta memperkuat keberadaan bangsa di wilayah perbatasan yang strategis. *Ravenstein's Laws of Migration* menjelaskan bahwa perpindahan penduduk seringkali dapat memperluas distribusi penduduk dan berkontribusi pada keseimbangan populasi di berbagai wilayah.⁵⁷ Dalam konteks transmigrasi di Provinsi Bengkulu, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana program transmigrasi membantu meningkatkan populasi di daerah yang sebelumnya kurang padat, sehingga mendukung kebutuhan tenaga kerja dan memperkuat basis penduduk di wilayah strategis.

Secara ekonomi, transmigrasi memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, yang menjadi andalan masyarakat transmigran. Dengan adanya lahan yang lebih luas dan program pendampingan dari pemerintah, para transmigran

⁵⁶ Keterangan dari Ahmad Wali, Staf Pengajar FH Universitas Bengkulu, pada 17 Agustus 2024 di Bengkulu

⁵⁷ Ernest George Ravenstein, "The Laws of Migration," *Journal of the royal statistical society*, vol. 52, no. 2 (1889), hlm. 241-305.

mampu mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara produktif, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal maupun nasional. Hal ini dikarenakan masyarakat transmigran melakukan berbagai pembaharuan dalam tata cara maupun komoditas pertanian yang dikembangkan di Bengkulu dan diikuti oleh masyarakat lokal, sehingga menimbulkan dampak perekonomian secara nyata dan menyeluruh.⁵⁸

Kondisi ini membuat adanya pusat-pusat perekonomian baru di wilayah Provinsi Bengkulu yang menjadi sumber peningkatan taraf perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Meskipun demikian, peningkatan perekonomian ini perlu didampingi dengan adanya afirmasi terhadap masyarakat lokal guna mencegah adanya kecemburuan sosial kepada masyarakat transmigran yang memperoleh bantuan dari pemerintah dalam pengembangan perekonomiannya.⁵⁹

Di bidang sosial dan budaya, transmigrasi turut memperkuat kohesi sosial dan integrasi kebangsaan di Bengkulu. Meskipun ada tantangan, seperti ketimpangan antara penduduk asli dan transmigran, program transmigrasi juga menciptakan kesempatan untuk saling belajar dan bertukar budaya. Pertukaran budaya ini dapat dilihat dari realita adanya tren penggunaan budaya masyarakat transmigran oleh masyarakat lokal yang tercermin dari mampunya masyarakat lokal bertutur kata dan memahami Bahasa Jawa yang notabene merupakan bahasa masyarakat transmigran.⁶⁰ Di sisi lain, masyarakat transmigran juga sudah terbiasa untuk menyantap hidangan khas masyarakat lokal dengan karakteristik rasa pedas yang berbeda dengan hidangan daerah asal masyarakat transmigran yang umumnya memiliki karakteristik rasa manis.⁶¹ Hal ini menggambarkan telah terjadi pertukaran budaya antara masyarakat lokal dengan masyarakat transmigran yang menjadi bukti telah berhasilnya adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat transmigran yang menghasilkan lingkungan sosial yang stabil dan harmonis.

Ekspansi Permasalahan tersebut juga dapat dikaji secara sosiologis menggunakan Teori Integrasi Sosial dan Kohesi Sosial yang digagas oleh Emile Durkheim. Menurut Durkheim, integrasi sosial terjadi ketika individu dalam masyarakat memiliki kesadaran

⁵⁸Hasil Wawancara Kepala Desa Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara pada 17 Agustus 2024 di Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Wali, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tanggal 18 Agustus 2024 di Giri Kencana, Kabupaten Bengkulu Utara.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Wagito, Kepala Sekolah Menengah Atas 5 Bengkulu Utara pada tanggal 18 Agustus 2024 di Giri Kencana, Kabupaten Bengkulu Utara

⁶¹*Ibid.*

kolektif yang kuat dan terikat oleh norma-norma serta nilai-nilai bersama.⁶² Dalam konteks transmigrasi di Bengkulu, teori Durkheim membantu dalam memahami bagaimana transmigrasi dapat memperkuat atau, sebaliknya, melemahkan kohesi sosial melalui interaksi antara masyarakat transmigran dan penduduk asli.

Lebih lanjut, dari aspek sosiokultural, budaya lokal terancam punah. Hal ini dapat dilihat pada kesenian Bangreja yang mulai tergusur oleh pengaruh budaya transmigran. Sebagai contoh, di daerah Rejang, lebih banyak orang yang fasih berbahasa Jawa dibandingkan bahasa Rejang sendiri. Akibatnya, suku-suku asli semakin termarginalkan dalam kehidupan sosial dan budaya di daerah tersebut. Hal tersebut memang dapat ditelisik menggunakan Teori Akulturasi yang dikembangkan oleh Robert E. Park menggambarkan proses perubahan budaya yang terjadi ketika dua kelompok budaya yang berbeda saling berinteraksi secara terus-menerus.⁶³ Dalam konteks masyarakat lokal dan pendatang, akulturasi dapat menyebabkan masyarakat lokal mengadopsi elemen budaya dari masyarakat pendatang, yang kemudian bisa mengarah pada pengikisan atau lunturnya budaya asli. Selain daripada itu, Milton Gordon juga mengembangkan teori asimilasi yang menggambarkan proses di mana kelompok minoritas (masyarakat lokal) secara bertahap kehilangan budaya mereka sendiri dan menyerap budaya mayoritas (pendatang).⁶⁴ Dalam konteks masyarakat lokal di Provinsi Bengkulu, asimilasi budaya dari masyarakat pendatang bisa menyebabkan lunturnya bahasa, adat istiadat, dan tradisi lokal.

Integrasi sosial pada Masyarakat lokal dan pendatang (transmigran) di Bengkulu juga dapat dijelaskan dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akulturasi. Proses integrasi sosial ini ditinjau dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons dengan konsepnya yang disebut AGIL, yaitu *Adaptation* (adaptasi), sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia diharuskan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan), yaitu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (Integrasi), yaitu sistem harus mengatur hubungan yang menjadi komponennya. Ia harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut. *Latency* (Latensi/pemeliharaan pola) di mana sistem harus melengkapi, memelihara dan

⁶² Harry Alpert, "Emile Durkheim and The Theory of Social Integration," *J. Soc. Phil.* 6 (1940), hlm. 172.

⁶³ Robert E Park, "Human Migration and The Marginal Man," *American journal of sociology* 33.6 (1928), hlm. 881-893.

⁶⁴ Milton M. Gordon, "Assimilation in America: Theory and Reality," *Daedalus*, vol. 90, no. 2 (1961), hlm. 263-285.

memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.⁶⁵

Sementara itu, Kim menemukan ada dua tahap adaptasi, yaitu *cultural adaptation* dan *cross-cultural adaptation*. *Cultural adaptation* merupakan proses dasar komunikasi yaitu di mana ada penyampai pesan, medium dan penerima pesan, sehingga terjadi proses encoding dan decoding. Proses ini didefinisikan sebagai tingkat perubahan yang terjadi ketika individu pindah ke lingkungan yang baru. Terjadi proses pengiriman pesan oleh penduduk lokal di lingkungan baru tersebut yang dapat dipahami oleh individu pendatang, hal ini dinamakan *enculturation*. *Enculturation* terjadi pada saat sosialisasi. Tahap yang kedua adalah *cross-cultural adaptation*. *Cross-cultural adaptation* meliputi tiga hal yang utama. Pertama, *acculturation*. Proses ini terjadi ketika individu pendatang yang telah melalui proses sosialisasi mulai berinteraksi dengan budaya yang baru dan asing baginya. Seiring dengan berjalannya waktu, pendatang tersebut mulai memahami budaya baru itu dan memilih norma dan nilai budaya lokal yang dianutnya. Walaupun demikian, pola budaya terdahulu juga mempengaruhi proses adaptasi. Pola budaya terdahulu yang turut mempengaruhi ini disebut *deculturation* yang merupakan hal kedua dari proses adaptasi.⁶⁶

Dalam "The Culture Transplant," Garrett Jones berpendapat bahwa ciri-ciri budaya dapat bertahan selama beberapa generasi setelah para migran tiba di negara baru. Para pendatang baru tidak hanya berasimilasi dengan rumah baru mereka; seperti yang tertulis pada subjudul buku tersebut, mereka "membuat perekonomian tempat mereka pindah sangat mirip dengan perekonomian tempat mereka meninggalkannya." Ini adalah tesis yang sangat provokatif yang sekaligus merupakan penegasan ulang akal sehat: Imigran yang dipilih dengan buruk dapat merusak keberhasilan suatu negara; budaya tidak hilang ketika orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain.⁶⁷

Transplantasi kultural (*cultural transplantation*) adalah sebuah konsep yang merujuk pada proses memindahkan atau memperkenalkan elemen-elemen budaya dari satu kelompok atau wilayah ke kelompok atau wilayah lain. Ini sering terjadi ketika individu atau kelompok orang pindah ke wilayah yang berbeda, membawa serta nilai, norma, tradisi, bahasa, atau gaya hidup mereka. Transplantasi kultural juga bisa terjadi melalui

⁶⁵ Lihat Intan Dwi Khusnul Afifa & Maya Mustika Kartika Sari, *Proses Integrasi Sosial Masyarakat Multietnik di Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Kajian Moral Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 tahun 2019, dapat diakses pada <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pondidikan-kewarganegaraan/article/view/30962/28176>

⁶⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/108215-ID-teori-teori-adaptasi-antar-budaya.pdf>

⁶⁷ <https://www.wsj.com/articles/the-culture-transplant-review-immigrations-legacy-11670794152>

kolonialisasi, migrasi, globalisasi, atau pengaruh media. Dalam proses transplantasi kultural, elemen-elemen budaya baru yang diperkenalkan dapat diterima, diadaptasi, diubah, atau bahkan ditolak oleh masyarakat yang menerimanya. Terkadang, proses ini dapat menghasilkan hibridisasi budaya, di mana unsur-unsur budaya lama dan baru menyatu menjadi sesuatu yang baru. Transplantasi kultural dapat menciptakan dinamika yang kompleks antara pelestarian identitas budaya asli dengan pengaruh budaya baru yang masuk.

Terkait dengan transmigrasi di Bengkulu Utara yang telah berlangsung sejak era kolonial Belanda, dapat dikatakan telah terjadi integrasi sosial melalui adaptasi, asimilasi dan akulturasi antara warga transmigran dengan penduduk local. Proses ini berlangsung puluhan tahun dan tidak selalu berlangsung mulus. Warga local belajar dari pendatang transmigran dan pendatang transmigran berusaha memahami kebudayaan warga local. Terjadi asimilasi dan akulturasi kebudayaan. Warga local menjadi pandai berbahasa Jawa, walau tidak berlaku sebaliknya. Warga transmigran masih kesulitan berbahasa daerah asli Bengkulu (Rejang dan lainnya). Dalam kesenian-pun terjadi pertukaran. Warga local menjadi terbiasa melihat kesenian Kuda Kepang, Reog, dan peringatn satu Suro ala warga Jawa pendatang.

Dapat dikatakan, telah jadi transplantasi kultural antara warga local dan warga transmigran di desa-desa eks transmigrasi. Dimana ada proses memindahkan atau memperkenalkan elemen-elemen budaya dari satu kelompok atau wilayah ke kelompok atau wilayah lain melalui kolonialisasi dan transmigrasi. Dalam proses transplantasi kultural di Bengkulu Utara ini, elemen-elemen budaya baru yang diperkenalkan dapat diterima, diadaptasi atau bahkan dimodifikasi oleh masyarakat yang menerimanya.

Penutup

Mengelola transmigrasi di Propinsi Bengkulu dan secara khusus di Kabupaten Bengkulu Utara adalah tidak sederhana dan penuh dinamika. Karena transmigrasi tidak hanya bertujuan untuk membawa kemanfaatan kepada warga transmigran saja. Namun juga terdapat masyarakat lokal Kabupaten Bengkulu Utara yang nasibnya harus diperhatikan dengan kehadiran program transmigrasi ke tempat tinggalnya.

Penerimaan masyarakat lokal Kabupaten Bengkulu Utara terhadap kebijakan transmigrasi dapat dikatakan baik yang tercermin dari minim adanya penolakan ataupun konflik sosial yang terjadi selama kebijakan transmigrasi ini berlangsung. Masyarakat lokal dan masyarakat transmigran sama-sama merasakan dampak positif keberlakuan kebijakan transmigrasi khususnya dalam bidang perekonomian. Walaupun hal ini tidak terjadi instan.

Memerlukan waktu puluhan tahun. Masyarakat transmigran mendapat kesempatan untuk mewujudkan status sosial yang lebih baik dibandingkan di daerah asalnya dengan adanya berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf perekonomian. Sedangkan masyarakat lokal memperoleh pengetahuan baru dalam pengelolaan pertanian dan terciptanya pusat-pusat perekonomian baru yang memberikan peluang peningkatan kesejahteraan.

Dampak positif pada bidang perekonomian tersebut membuat pola interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat transmigran berjalan harmonis. Keharmonisan membuat proses integrasi antara masyarakat lokal dan masyarakat transmigrasi berjalan dengan lancar dan menghasilkan interaksi antar budaya terjadi dalam beberapa aspek seperti pemahaman masyarakat lokal terhadap bahasa transmigran dan cita rasa kuliner masyarakat transmigran yang mengikuti masyarakat lokal. Ini seperti teori Integrasi Sosial yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim.

Terjadinya interaksi antar budaya tersebut tidak menghilangkan kebudayaan khas masyarakat lokal Kabupaten Bengkulu Utara maupun masyarakat transmigran yang terus dilestarikan pada generasi selanjutnya. Sebaliknya saling mempengaruhi melalui akulturasi dan asimilasi serta saling mentransplantasi budaya. Walaupun, di sisi pendatang warga transmigran nampak lebih dominan mentransplantasi budaya khas Jawa kepada warga local (sesuai aras pemikir Garrett Jones) daripada sebaliknya.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini dapat disusun dengan adanya pendanaan hibah riset dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2024. Selain itu, penyusunan artikel ini juga ditunjang oleh berbagai pihak yang bersedia menjadi narasumber maupun memfasilitasi proses berjalannya riset ini antara lain Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum. selaku Dekan FH Universitas Bengkulu beserta Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Referensi

Aan Budianto, *Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950an*, dalam Jurnal Candi Volume 20/ No.1/Tahun XI/ Maret 2020.

Afifa, Intan Dwi Khusnul, Maya Mustika Sari. (2019). "Proses Integrasi Sosial Masyarakat Multietnik Di Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto". *Kajian Moral Kewarganegaraan*, (07)02, 1346-1360.

Alpert, Harry. (1940). "Emile Durkheim and The Theory of Social Integration." *Social Forces*, (68)4, 1089-1103.

“Bengkulu Utara Gelar Upacara Hari Transmigrasi ke 66 Bela Negara dan Hari Ibu ke 88.”
Kabupaten Bengkulu Utara. 2024.

Dodi Harsono & Ahmad Aminudin, *Koordinasi dalam Model Pengembangan Wilayah Berbasis Kota Terpadu Mandiri (KTM), Studi Pada KTM Lagita (Lais, Giri Mulya, Ketahun), Kabupaten Bengkulu*, Jurnal Governance dan Administrasi Publik VOL. 5

Gordon, Milton M. (1961). "Assimilation in America: Theory and Reality." *Daedalus*, (90)2, 263-285.

<https://merionwest.com/2024/04/08/people-over-place-a-review-of-the-culture-transplant-by-garett-jones/>

<https://cpps.ugm.ac.id/tantangan-transmigrasi-masih-banyak-yang-memilih-bermigrasi-ke-luar-negeri/>

<https://news.detik.com/berita/d-6328940/program-transmigrasi-lagita-dorong-kesejahteraan-warga-di-bengkulu-utara>

<https://www.wsj.com/articles/the-culture-transplant-review-immigrations-legacy-11670794152>

Hasan, Renol, *et al.* (2023). "Persepsi Masyarakat Transmigran Jawa di Daerah Paguyaman Provinsi Gorontalo Terhadap Kebijakan Transmigrasi Pada Masa Pemerintahan Soeharto". *Dynamics of Rural Society Journal*, (1)1, 32-41.

Hendra Kurniawan, *Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870* dalam *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 11 No. 2 tahun 2014.

I Gde Nitiyasa & I Ketut Sudibia, *Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah*, PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. IX No. 1 Juli 2013.

I Made Sarmita, *Potensi Konflik di Daerah Tujuan Transmigrasi (Kasus Sampit dan Mesuji)* dalam *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, Vol. 15 No. 1 tahun 2014.

Indah Setyorini, Gusti Zulkifli Mulki, Firsta Rekayasa Hernovianty, *Peran Transmigrasi Terhadap Pengembangan Wilayah di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya*, dalam *JeLAST : Jurnal Teknik Kelautan , PWK , Sipil, dan Tambang* Vol. 5, No 3 (2018)

Institute for Ecosoc Rights and Norwegian Centre for Human Rights, *Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit : Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit*, 2017.

International Court of Justice. (2014). *Publications*. Available online from : <http://www.icj-cij.org/publications/index.php?p1=8> [accessed 1 January, 2015].

Irianto, Sulistyowati. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Jones, Garrett, *The Culture Transplant: How Migrants Make the Economies They Move To a Lot Like the Ones They Left*, Stanford University Press, 2022.
- Lindayanti, *Menuju Tanah Harapan Kolonisasi Orang Jawa di Bengkulu*, dalam Jurnal Humaniora Vol. 18 No. 3 Oktober 2006.
- Mantra, Ida Bagus. (1985). *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya
- Mujtahid, Iqbal, *et al.* (2017) "A Model of Policy Implementation of Integrated Self-Sufficient City on Transmigration Area (A Case Study in Northern Bengkulu, Bengkulu Province)". *Journal of Social Science Studies*, (5)1, 1-4.
- Oey, Mayling. (1980). "The Transmigration Program in Indonesia." Makalah Seminar on Government Resettlement Programmes in Southeast Asia. Australia National University.
- Park, Robert E. (1928). "Human Migration and The Marginal Man". *American Journal of Sociology*, (33)6, 881-893.
- Setiawan, Nugraha. (1994). "Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya." Program Pascasarjana Program Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press.
- Turner, Jonathan H. "Emile Durkheim's Theory of Social Organization," *Social Forces* 68, no. 4 (June 1990): 1089-1104.
- "Tantangan Transmigrasi, Masih Banyak yang Memilih Bermigrasi ke Luar Negeri." Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gadjah Mada. 2016.
- Transmigrasi: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Bentuknya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6992734/transmigrasi-pengertian-sejarah-tujuan-dan-bentuknya>,
- Utami, Lusia Savitri Setyo. (2015). "Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya". *Jurnal Komunikasi*, (7) 2, 180-197.
- Yanmesli. Anggun Dwi Utami. Supriyono. Muhammad Alfi. (2022). "Tantangan Masyarakat Transmigran dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi di UPT Durian Amparan Kabupaten Bengkulu Utara". *Jurnal Georaflesia*, (7)2, 243-257.
- Yudhi Zuriah Wirya Purba, Wardi Saleh, *Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian*, Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI), Volume 1 Nomor 1 Edisi Februari 2023
- Yuminarti, Umi. (2017). "Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua: Masalah dan Harapan." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, (12)1, 13-24.